



**LAPORAN KINERJA
INTANSI PEMERINTAH
(L K I P)**



2022

**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jl. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200 Telp : (0265) 548786 Fax : (0265) 548777

KATA PENGANTAR

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya mengemban amanah sebagai penyelenggara 3 (tiga) urusan pemerintahan dan juga termasuk dalam perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang pekerjaan umum dan urusan bidang perumahan rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 6 (enam) bidang dan 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dokumen LKIP ini merupakan bentuk perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur dengan memperhatikan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan.



Selanjutnya, ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, semoga dokumen LKIP ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan serta menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tasikmalaya, Februari 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA,**



M FUAD ABDUL AZIZ S.T, M.P

Pembina Tk. I

NIP. 19660704 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	I-1
B. STRUKTUR ORGANISASI	I-2
C. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA	I-3
D. ISU AKTUAL	I-7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	I-9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
B. RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH	II-5
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	II-6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
B. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	III-31
C. REALISASI ANGGARAN	III-34
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Kendaraan Operasional DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	I-4
Tabel 1.2	Sarana Kerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	I-5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan DPUTRLH Tahun 2022-2026	II-2
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	II-4
Tabel 3.1	IKU DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun Pelaporan dan Realisasi pada Tahun Sebelumnya	III-4
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 DPUTRLH	III-5
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan akyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun Pelaporan dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra SKPD	III-6
Tabel 3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Pencapaian Kinerja DPUTRLH Tahun 2022	III-7
Tabel 3.6	Capaian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-8
Tabel 3.7	Penyelenggaraan Jalan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-10
Tabel 3.8	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-31
Tabel 3.9	Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator Dinas PUTRLH	III-32
Tabel 3.10	Pagu dan Realisasi Keuangan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	III-35

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya	I-3
Gambar 1.2	Profil Demografi ASN DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	I-4
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	II-7
Gambar 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	II-10
Gambar 3.1	Dokumentasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-12
Gambar 3.2	Dokumentasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-15
Gambar 3.3	Dokumentasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-19
Gambar 3.4	Dokumentasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-22
Gambar 3.5	Dokumentasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-23
Gambar 3.6	Dokumentasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-25
Gambar 3.7	Dokumentasi Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-26
Gambar 3.8	Dokumentasi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-28
Gambar 3.9	Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	



	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-29
Gambar 3.10	Dokumentasi Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	III-30

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat : DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu : 1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 2) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan 3) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Tasikmalaya.

Kedudukan, susunan organisasi beserta tugas dan fungsi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, khususnya pada Bagian Ketujuh Pasal 25 sampai dengan Pasal 28. DPUTRLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang **berkedudukan** di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPUTRLH mempunyai **tugas pokok** membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, mempunyai **fungsi**:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;

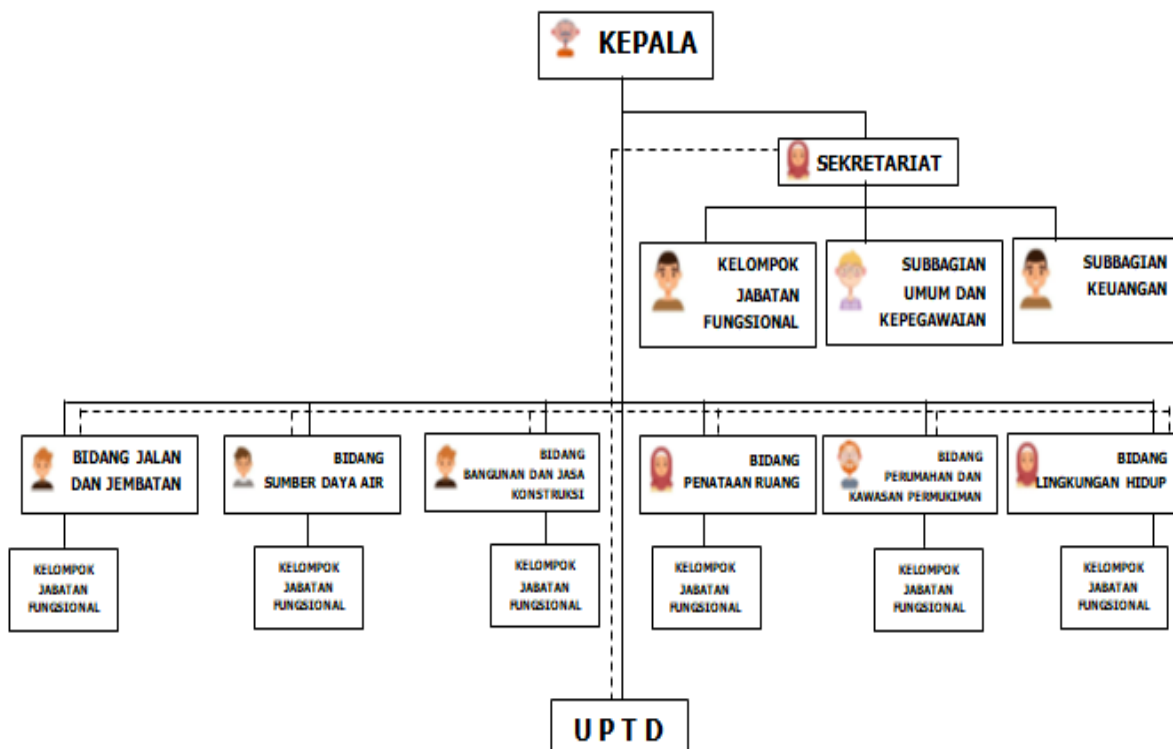
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Jalan dan Jembatan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Sumber Daya Air;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Penataan Ruang;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Bidang Lingkungan Hidup;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

GAMBAR 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI DPUTRLH KABUPATEN TASIKMALAYA

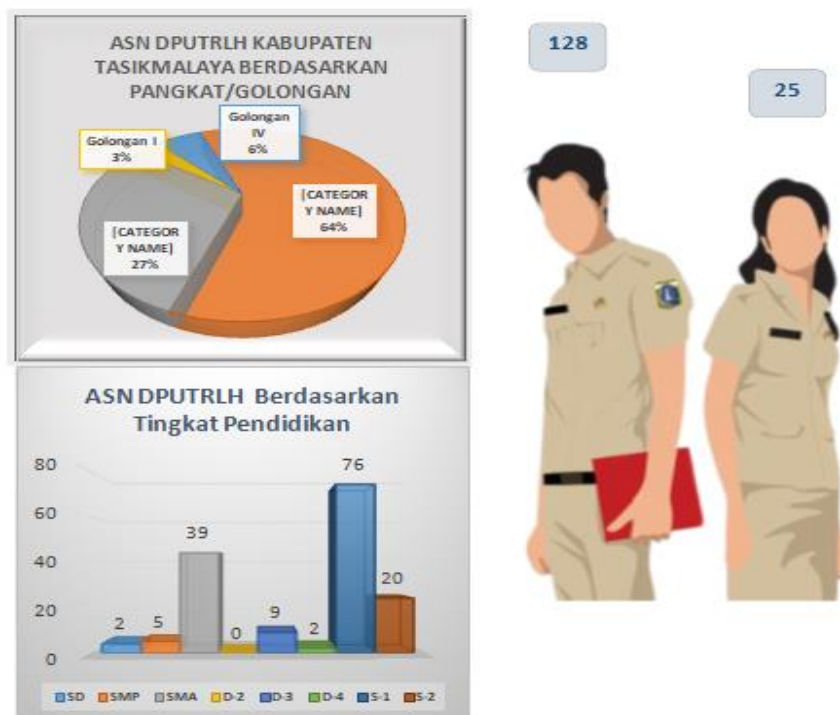


Sumber: Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021

C. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

Dalam aspek kepegawaian, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2022, jumlah aparatur DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 153 orang, terdiri dari 128 laki-laki dan 25 perempuan, yang secara jumlah dan komposisinya dapat dilihat dengan profil sebagai berikut:

GAMBAR 1.2.
PROFIL ASN DPUTRLH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya (per 31 Desember 2022)

Dari aspek sarana prasarana, kinerja pelayanan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya kendaraan operasional dan sarana kerja sebagaimana disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

TABEL 1.1.
KENDARAAN OPERASIONAL DPUTRLH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Alat-alat angkutan , terdiri dari :		
	1. Kendaraan Roda 4 (empat)		
	- Mini Bus	13	Unit
	- Pick Up	14	Unit
	2. Kendaraan Roda 6 (Enam)		
	- Dump truck	3	Unit
	3. Kendaraan Roda 2 (dua)		
	- Sepeda Motor	64	Unit
2	Alat Berat		
	- Asphalt Mixing Plant	2	Unit
	- Macadam Roller/Three Whell Roller	1	Unit
	- Tandam Roller	5	Unit
	- Stamper	24	Unit
	- Compacting Equipment Lain-lain	4	Unit
	- Stone Crushing Plant	23	Unit
	- Wheel Loader+Attachmnet	1	Unit
	- Loader Lain-lain	1	Unit
	- Portable Compressor	1	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
3	Alat-alat Lainnya		
	- Lubricating Equipment	2	Unit
	- Perkakas Bengkel Listrik	1	Unit
	- Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	9	Unit
	- Global Positioning System	29	Unit
	- ALat Ukur Universal Lain-lain	7	Unit
	- Alat Ukur Lainnya	7	Unit
	- Universal tester lainnya	1	Unit
	- Pompa Air	9	Unit
	- Alat Pengukur Curah Hujan	21	Unit
	- PTimbangan Meja	1	Unit
	- Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak (dst)	1	Unit
	- Alat Laboratorium lainnya	1	Unit
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Unit
	- Brand Kas	2	Unit
	- Generating Set	9	Unit

Sumber: Pengurus Barang DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
(per 31 Desember 2022)

TABEL 1.2.
SARANA KERJA DPUTRLH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Listrik	1	Jaringan
2	Alat Komunikasi Telepon	2	Line (1Fax)
3	Peralatan Jaringan Lainnya	6	Unit
4	Area Parkir	1	Area
5	Lemari Kaca	2	Unit
6	Lemari kayu	14	Unit
7	Alat Penghancur Kertas	15	Unit
8	Mesin Absensi	2	Unit
9	Meja Resepsionis	52	Unit
10	Meja Kerja	15	Unit
11	Meja Komputer	1	Unit
12	Sofa	1	Unit
13	Lemari arsip	2	Unit
14	Mesin Potong Rumput	49	Unit
15	AC	18	Unit
16	Radio	1	Unit
17	Tustel	17	Unit
18	P.C Unit	26	Unit
19	Laptop	44	Unit
20	Printer	128	Unit
21	Geological Hammer	1	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
22	Server	4	Unit
23	Camera + Attachment	14	Unit
24	Lensa Kamera	3	Unit
25	Infocus	4	Unit
26	Drill Machine	3	Unit
27	Balance	2	Unit
28	Drilling	1	Unit
29	Rammer	10	Unit
30	Personal Komputer	13	Unit
31	Meja Kerja	15	Unit
32	Lemari Besi/Metal	2	Unit
33	Rak Besi	3	Unit
34	Rak Kayu	6	Unit
35	Filing Cabinet Besi	6	Unit
36	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
37	Papan Nama Instansi	1	Unit
38	Peralatan Personal Komputer lainnya	3	Unit
39	Peralatan Jaringan Lainnya	6	Unit
40	Traffic Light	1	Unit
41	Hard Disk	5	Unit
42	Scanner	1	Unit
43	Note Book	42	Unit
44	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit
45	Teropong	1	Unit
46	Alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	1	Unit
47	Meja ½ Biro	15	Unit
48	Kursi Tamu	1	Unit
49	Bangku Tunggu	22	Unit
50	Mebeuleur lainnya	1	Unit
51	Lemari Es	1	Unit
52	Alat Pendingin Lainnya	6	Unit
53	Televisi	5	Unit
54	Sound System	3	Unit
55	Tangga Alumunium	1	Unit
56	Podium/Mimbar	1	Unit
57	Gordyin	1	Unit
58	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	Unit
59	Detektor Kebakaran	1	Unit
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
61	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1	Unit
62	Peralatan Audio Studio	4	Unit
63	Camera Elektronik	1	Unit
64	Camera View Finder	1	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
65	Photo Tustel	3	Unit
66	Layar Film/Projector	8	Unit
67	Alat Studio Video lainnya	1	Unit
68	Peralatan umum lainnya (dst)	8	Unit
69	Alat Komunikasi Sosial	4	Unit
70	Genset	1	Unit
71	Exkavator	1	Unit
72	Concrete Hammer Set	1	Unit
73	Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya	8	Unit
74	Alat laboratorium kimia lainnya (dst)	1	Unit
75	Air Compressor (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit
76	Distiling Apparatus	4	Unit
77	Alat laboratorium energi surya lainnya (dst)	1	Unit
78	Falling Cone Panatro Meter	1	Unit

Sumber: Pengurus Barang DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
(per 31 Desember 2022)

D. ISU AKTUAL

DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya memegang peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan serta peningkatan infrastruktur permukiman dan kawasan strategis. Pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Penyelenggaraan infrastruktur jalan merupakan isu aktual yang selalu muncul setiap tahun dan dapat dikatakan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana diketahui bahwa masih rendahnya ruas jaringan jalan yang dalam kondisi baik dimana berdasarkan data capaian tahun 2021, rasio jaringan jalan dalam kondisi baik masih berada pada angka 0,512. Pada tahun 2022, dengan memanfaatkan ketersediaan pendanaan yang ada, penyelenggaraan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten

Tasikmalaya lebih difokuskan pada pembangunan dan rekonstruksi jalan di wilayah selatan dan pemeliharaan berkala pada ruas-ruas jalan strategis.

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan difokuskan pada jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya dibawah 1000 Ha di sentra pertanian di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

lebih lanjut, pembangunan infrastruktur daerah juga difokuskan pada penyediaan fasilitas terbuka bagi publik di kawasan strategis dan peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintahan yang diwujudkan melalui pembangunan Alun-Alun Singaparna dan optimalisasi bangunan gedung pemerintahan di kawasan kompleks perkantoran dan gedung kantor Kecamatan.

Selain pembangunan infrastruktur, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya juga berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan peran utama untuk mengurangi kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan terkait isu penurunan stunting, DPUTRLH berperan dalam penyediaan akses air minum yang aman dan akses sanitasi yang layak.

Isu aktual yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diantaranya adalah peningkatan kualitas air dan udara, peningkatan pengelolaan persampahan mulai dari pengangkutan, distribusi sampai dengan pengelolaan di TPA termasuk penguatan penyediaan sarana dan prasarannya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*issued strategic*) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- B. Strukur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian, Sarana Dan Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dari aspek perencanaan kinerja, tahun 2022 merupakan periode kedua dari perencanaan strategis jangka menengah daerah periode Tahun 2021-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah DPUTRLH Tahun 2021-2026.

A. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).

Adapun gambaran mengenai perencanaan kinerja tahun 2022 berikut disajikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dimuat dalam Renstra DPUTRLH Tahun 2021-2026.

1) Renstra DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya

TABEL 2.1.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
DPUTRLH TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu serta berwawasan lingkungan	Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, pusat perdagangan, dan destinasi pariwisata
			Penataan infrastruktur kawasan ibu kota pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
			Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan		Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat
			Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten
			Pembangunan rumah layak huni dan penataan kawasan perumahan dan permukiman
			Peningkatan drainase perkotaan dan lingkungan
Peningkatan sarana dan prasarana persampahan			
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim	
Meningkatnya pengelolaan sampah	Mendorong tumbuhnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Menginisiasi dan memberikan dukungan untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat peduli sampah	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Optimalisasi prosedur kerja pelayanan administrasi perkantoran	Penguatan penyelenggaraan SOP pelayanan administrasi perkantoran serta peningkatan kepedulian pada penghematan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur	Penguatan akuntabilitas pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur
		Optimalisasi pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kompetensi SDM
		Optimalisasi kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dinas	Penguatan penyelenggaraan SOP SAKIP

Gambaran tujuan dan sasaran strategis DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021-2026 (periode RPJMD dan Renstra baru) dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

TABEL 2.2.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DPUTRLH TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2021-2026					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,496	0,511	0,562	0,577	0,593	0,609
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,04%	69,51%	69,99%	70,45%	70,92%	71,39%
		Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	47,31%	51,04%	56,27%	61,50%	66,73%	71,96%
		Ketaatan terhadap RTRW	25,63%	29,50%	33,38%	37,27%	41,16%	45,06%
	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air minum	65,42%	65,92%	66,42%	66,92%	67,42%	67,92%
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	48,89%	49,34%	49,81%	50,27%	50,73%	51,19%
		Rasio rumah layak huni	0,2528	0,2533	0,2537	0,2542	0,2547	0,2552
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,14%	52,20%	52,39%	52,57%	52,75%	52,94%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,68	64,78	64,88	64,98	65,08	85,18
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	6,79%	8,24%	9,82%	12,57%	14,72%	16,50%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,12	53	56	59	61	61	

B. RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).

1) Renja DPUTRLH Tahun 2022

Dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya menyusun Renja Tahun 2022 dan menguraikan dalam 26 (*Dua Puluh Enam*) Program, 40 (*empat Puluh*) Kegiatan dan 96 (*Sembilan Puluh Enam*) Subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.041.249.317.860 (*Satu Triliun Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).

2) Renja Perubahan DPUTRLH Tahun 2022

Penyusunan dokumen Renja Perubahan dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi Renja Tahun 2022 Semester I dan mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPUTRLH pada tahun berjalan, yang selanjutnya akan mempengaruhi pada kebijakan umum anggaran.

Pada Renja Perubahan Tahun 2022, Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 16 (*Enam Belas*) Program, 21 (*Dua Puluh Satu*) Kegiatan dan 44 (*Empat Puluh Empat*) Subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 198.984.123.068 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*).

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, **Kinerja** adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.


Sedangkan **Perjanjian Kinerja (PK)** adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

PK dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja yang berisikan tentang pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja dan lampiran kinerja yang disusun dengan mencantumkan indikator kinerja, target kinerja, program dan kegiatan pada tahun tertentu. Penusunan PK bertujuan:

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

PK disusun setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berikut disajikan PK Tahun 2022 dan Perubahan PK tahun 2022:

GAMBAR 2.1.
PERJANJIAN KINERJA DPUTRLH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ADE SUGIANTO
Jabatan : Bupati Tasikmalaya


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Singaparna, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,



ADE SUGIANTO

Pihak Pertama,



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si.
NIP. 19630418 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,511	Program Penyelenggaraan Jalan
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,51%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Persentase ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	51,04%	Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Ketaatan terhadap RTRW	29,50%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
2.	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak	Rasio Rumah Layak Huni	0,2533	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Program Kawasan Permukiman
		Persentase penduduk berakses air minum	65,92%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	49,34%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,20%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,78	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Prosentase sampah yang terkelola	8,24%	Program Pengelolaan Persampahan
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	53 (CC)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22,760,789,535	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7,455,000,000	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10,497,803,000	
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10,364,998,000	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	250,000,000	
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	6,895,000,000	
7	Program Penyelenggaraan Jalan	63,897,862,533	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	200,000,000	
9	Program Pengembangan Perumahan	1,000,000,000	
10	Program Kawasan Permukiman	5,820,000,000	
11	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	520,000,000	
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	250,000,000	
13	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,028,500,000	
14	Program Pengelolaan Persampahan	1,031,100,000	
Jumlah Total		131.971.053.068	


Singaparna, 06 Januari 2022

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTOPLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN BANYAK DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYADrs. RAHMATU JAMILAH ABDULLAH, S.Sos, M.Si.

NIP. 196902281989031005

GAMBAR 2.2.
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DPUTRLH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. FUAD ABDUL AZIZ, S.T, M.P
 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ADE SUGIANTO
 Jabatan : Bupati Tasikmalaya


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Singaparna, Nopember 2022

Pihak Kedua,



ADE SUGIANTO

Pihak Pertama



Drs. RAHAYU JAMIAH ABDULLAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690718 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,511	Program Penyelenggaraan Jalan
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,51%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Persentase ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	51,04%	Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Ketaatan terhadap RTRW	29,50%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
2.	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak	Rasio Rumah Layak Huni	0,2533	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Kawasan Permukiman
		Persentase penduduk berakses air minum	65,92%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	49,34%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,20%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,78	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Prosentase sampah yang terkelola	8,24%	Program Pengelolaan Persampahan
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	53 (CC)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.074.967.535,00	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	22.833.244.875,00	
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.706.552.000,00	
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.624.246.000,00	
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	222.310.000,00	
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	27.013.670.000,00	
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	131.091.943.016,00	
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	485.360.000,00	
9.	Program Pengembangan Perumahan	-	
10.	Program Kawasan Permukiman	5.777.730.000,00	
11.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	800.860.000,00	
12.	Program Peningkatan Pasirana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	224.580.000,00	
13.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	
14.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75.000.000,00	
15.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.006.070.000,00	
16.	Program Pengelolaan Pemasalahan	1.725.915.000,00	
Jumlah Total		234.818.438.426,00	

Bupati Tasikmalaya

ADE BUDIANTO

Tasikmalaya, November 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pelaporan kinerja adalah salah satu sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Dalam siklus penyelenggaraan SAKIP, pelaporan kinerja disusun setelah dilakukan pengelolaan data kinerja. Hasil pelaporan kinerja akan menjadi masukan bagi reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja secara periodik.

Berdasarkan Renstra DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang diukur melalui 11 (sebelas) indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUTRLH Kabupaten. IKU dan penjelasan formulasi perhitungan capaian IKU tersebut dijelaskan pada Tabel 3.1. berikut.

TABEL 3.1.
IKU DPUTRLH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/Rumus	Sumber Indikator	Unit Kerja Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sudah jelas	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sekretariat
2.	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Bidang Jalan dan Jembatan
		3. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten x100%	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Bidang Sumber Daya Air
		4. Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik ditambah Persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan	Indikator mandiri hasil perhitungan unit kerja penanggung jawab	Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi
		- Persentase bangunan gedung pemerintahan yg layak difungsikan sebagai pelayanan publik (80%)	Jumlah bangunan pemerintahan yang telah dibangun dibagi jumlah kebutuhan bangunan pemerintahan x80%		
		- Persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan (20%)	Jumlah fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan yang telah dibangun dibagi Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan x20%		
		5. Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW ditambah Rencana Peruntukan dibagi dua	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Bidang Tata Ruang
3.	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	6. Persentase penduduk berakses air minum	Penduduk berakses air minum dibagi jumlah penduduk x100%	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		7. Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibagi jumlah rumah tinggal x100%	Permen PU Nomor : 29/PRT/M/2018	
		8. Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	
		9. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu x100%	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Bidang Lingkungan Hidup
5.	Meningkatnya pengelolaan sampah	11. Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang tertangani (ton) dibagi total jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota (ton) x100%	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	

Sumber : SK Penetapan IKU DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Dijelaskan pada Pasal 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 bahwa **Pengukuran Kinerja** merupakan proses penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD;
2. membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya;
3. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis;
4. membandingkan dengan organisasi lain (benchmarking).

Hasil pengukuran kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel-tabel dan gambar-gambar di bawah ini.

TABEL 3.2.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DPUTRLH KABUPATEN
TASIKMALAYA PADA TAHUN PELAPORAN DAN REALISASI
PADA TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun	
			2021	2022
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam Kondisi baik	Poin	0,512	0,542
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	66,84	69,51
	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang Layak Difungsikan	Persen	47,67	51,40
	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	21,77	22,44
Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	65,61	65,97
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	48,91	49,16
	Rasio rumah layak huni	Poin	0,2528	0,2535
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,14	52,16
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,62	68,43
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	8	9,05
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	25,12	45

Berikut disajikan perbandingan persentase capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 3.3. di bawah ini.

TABEL 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021–2022
DPUTRLH KABUPATEN TASIKMALAYA

MISI	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
			2021	2022
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu serta berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	103,23	106,05
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	96,81	100
		Cakupan Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	100,76	100,71
		Ketaatan terhadap RTRW	84,94	76,06
	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak	Persentase penduduk berakses air minum	100,29	100,08
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	100,04	99,64
		Rasio Rumah Layak Huni	100	100,09
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	100	99,92
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	104,54	105,63
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	117,82	109,86
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	84,91

Selain melakukan perbandingan capaian kinerja tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya, dalam pengukuran kinerja juga dilakukan perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja sasaran 5(lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

TABEL 3.4.
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DPUTRLH KABUPATEN TASIKMALAYA PADA TAHUN PELAPORAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA SKPD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Realisasi Kinerja sd. Tahun 2022	Target Pada Periode Akhir Renstra	Persentase Capaian Target Renstra sd Tahun 2022
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam Kondisi baik	Poin	0,512	0,542	0,609	89,00%
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	66,84	69,51	71,39	97,37%
3.	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang Layak Difungsikan	Persen	47,67	51,40	71,96	71,43%
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	21,77	22,44	45,06	49,80%
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	65,61	65,97	67,92	97,13%
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	48,91	49,16	51,19	96,03%
7.	Rasio rumah layak huni	Poin	0,2528	0,2535	0,2552	99,33%
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,14	52,16	52,94	98,53%
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,62	68,43	65,18	104,99%
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	8	9,05	16,5	54,85%
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	25,12	45	61 (B)	73,77%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan pencapaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya pada tahun pelaporan serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 3.5. di bawah ini.

TABEL 3.5.
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN
ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN PENCAPAIAN KINERJA
DPUTRLH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

No	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Kinerja 2021	Persentase Capaian Kinerja 2022	Perbandingan Kinerja 2022 dengan 2021		Analisis Penyebab Peningkatan /Penurunan Kinerja	Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
				Meningkat	Menurun		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	103,23	106,05	√		Didukung dengan pen danaan Ban prov dan DAK	-
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	96,81	100	√		Sesuai target rencana	-
3.	Cakupan keterse diaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pen dukungnya yang layak difungsikan	100,76	100,71		√	-	-
4.	Ketaatan terhadap RTRW	84,94	76,06		√	Pendanaan untuk penyusunan dokumen RDTR tidak sesuai target rencana	Peningkatan usulan pendanaan pada tahun berikutnya
5.	Persentase penduduk berakses air minum	100,29	100,08		√	-	-
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	100,04	99,64		√	Kurang didukung dengan anggaran yang memadai	Peningkatan usulan pendanaan
7.	Rasio rumah layak huni	100	100,09	√		Didukung dengan anggaran yang memadai	-
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	100	99,92		√	Kurang didukung dengan anggaran yang memadai	Peningkatan usulan pendanaan
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	104,54	105,63	√		Didukung dengan anggaran yang memadai	-
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	117,82	109,86		√	-	-
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah	100	84,91		√	Kurang didukung dengan anggaran yang memadai	Anggaran diusulkan kembali pada tahun berikutnya

TABEL 3.6.

**CAPAIAN KINERJA DPUTRLH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam Kondisi baik	Poin	0,511	0,542	106,05%
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,51%	69,51	100%
3.	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yg Layak Difungsikan	Persen	51,04%	51,40	100,71%
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	29,50%	22,44	76,06%
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	65,92%	65,97	100,08%
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	49,34%	49,16	99,64%
7.	Rasio rumah layak huni	Poin	0,2533	0,2535	100,09%
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,20%	52,16	99,92%
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,78	68,43	105,63%
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	8,24%	9,05	109,86%
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	53	45	84,91%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022					98,45%

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 sebesar 98,45% (BAIK), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Adapun penjelasan capaian indikator dari masing-masing sasaran kinerja Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 di jelaskan sebagai berikut.

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dihitung dengan formulasi : panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya.

Berdasarkan penetapan Kepala Daerah tentang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten (Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya No 620/1394/DBMP Tahun 2012 Tentang Penetapan Rencana Umum Jaringan Jalan Kabupaten), Kabupaten Tasikmalaya memiliki 176 ruas jalan dengan total panjang jalan sebesar 1.303,32 km. Hingga akhir tahun 2021, panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 667,875 km, sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,512 dengan perhitungannya sebagai berikut.

$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \\ = \frac{667,875 \text{ Km}}{1303,32 \text{ Km}} = 0,512$$

Sumber: LKIP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Pada tahun pelaporan, pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan yang terdiri dari 1(satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan 5(lima) sub kegiatan. Dalam rangka peningkatan capaian indikator kinerja sasaran proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, sepanjang tahun 2022 DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan di 65 (enam puluh lima) ruas jalan kewenangan Kabupaten dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 3.7.

**PENYELENGGARAAN JALAN DPUTRLH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2022**

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Sub Kegiatan
1	Mangunreja - Sukaraja	Mangunreja	Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
2	Ciwatin - Kalapagenap	Pancatengah	Pembangunan Jalan
3	Cibuntu - Pugeran	Bojongasih	Pembangunan Jalan
4	Puspahiang - Mandalasari	Puspahiang	Pembangunan Jalan
5	Kudang - Cibeuti	Sukarame, Singaparna	Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
6	Mangunreja - Sangegeng	Mangunreja	Pembangunan Jalan
7	Darawati - Culamega	Culamega	Pembangunan Jalan
8	Sukakarta-Setiawangi	Jatiwaras	Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
9	Cantigi - Sukajadi	Cisayong	Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
10	Bojongkapol - Cikangkung	Bojonggambir	Rekonstruksi Jalan
11	Pasirgintung - Lengkongbarang	Cikatomas	Rekonstruksi Jalan
12	Ciandum - Batununggal	Bojonggaber	Rekonstruksi Jalan
13	Cidugaleun - Parentas	Cigalontang	Rekonstruksi Jalan
14	Cireundeu Cihanura	Bojonggaber	Rekonstruksi Jalan
15	Dalam Kota Singaparna Singaparna	Singaparna	Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
16	Gununganten - Pamijahan	Bantarkalong	Rekonstruksi Jalan
17	Taraju-Sodonghilir-Derah	Sodonghilir	Rekonstruksi Jalan
18	Sindangreret - Cidadap	Karangnunggal	Rekonstruksi Jalan
19	Ciwatin - Kalapagenap	Pancatengah	Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
20	Cayur - Neglasari - Tawang	Pancatengah	Rekonstruksi Jalan
21	Cibongas - Tawang	Pancatengah	Rekonstruksi Jalan
22	Papayan - Cikalong	Salopa	Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
23	Warungpeuteuy - Taraju	Salawu	Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
24	Pagedingan - Cisayong	Cisayong	Rekonstruksi Jalan
25	Ciawi - Singaparna	Jamanis, Sukaratu, Ciawi	Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan
26	Jalan Masuk Terminal Ciawi	Ciawi	Rekonstruksi Jalan
27	Cisema - Guranteng	Pagerageung	Pemeliharaan Berkala Jalan
28	Ciawi - Panumbangan	Sukaresik	Pemeliharaan Berkala Jalan
29	Rajapolah - Cihaurbeuti	Rajapolah	Pemeliharaan Berkala Jalan
30	Cisayong - Cigorowong	Cisayong	Pemeliharaan Berkala Jalan
31	Sentralpeuyeum - Pamokolan	Rajapolah	Pemeliharaan Berkala Jalan
32	Cikukulu - Cibatu	Karangnunggal	Pemeliharaan Berkala Jalan
33	Ereunpalay - Bojongasih	Cibalong	Pemeliharaan Berkala Jalan
34	Rancabakung - Pasirdagul	Karangnunggal	Pemeliharaan Berkala Jalan
35	Sukagalih - Ciponyo	Sukaratu	Pemeliharaan Berkala Jalan
36	Ciseda-Sayuran	Singaparna	Pemeliharaan Berkala Jalan
37	Cikaret - Cikapinis	Karangnunggal	Pemeliharaan Berkala Jalan
38	Cimerah-Sariwangi	Singaparna	Pemeliharaan Berkala Jalan
39	Cikukulu - Pasirmaung	Karangnunggal	Pemeliharaan Berkala Jalan
40	Cimanisan - Barumekar	Cibalong	Pemeliharaan Berkala Jalan
41	Cibalong-Derah	Cibalong	Pemeliharaan Berkala Jalan
42	Derah - Simpangurmi	Bojongasih	Pemeliharaan Berkala Jalan
43	Simp. Pamijahan - Bantarkalong	Bantarkalong	Pemeliharaan Berkala Jalan

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Sub Kegiatan
44	Warunglegok - Cikeusal	Tanjungjaya	Pemeliharaan Berkala Jalan
45	Simp. Arjasari - Cisaruni	Leuwisari	Pemeliharaan Berkala Jalan
46	Singaparna - Sariwangi	Sariwangi	Pemeliharaan Berkala Jalan
47	Sentral Peuyeum - Sukahening	Sukahening	Pemeliharaan Berkala Jalan
48	Rajapolah - Kiarajungkung	Sukahening	Pemeliharaan Berkala Jalan
49	Taraju-Bojongsambir	Taraju	Pemeliharaan Berkala Jalan
50	Bolang - Suniabana	Salopa	Pemeliharaan Berkala Jalan
51	Singaparna - Cigalontang	Singaparna	Pemeliharaan Berkala Jalan
52	Cirendeul - Cihanura	Bojongkapol	Pemeliharaan Berkala Jalan
53	Batununggal - Sukahurip	Cipatujah	Pemeliharaan Berkala Jalan
54	Warunglegok - Sangegeng	Mangunreja	Pemeliharaan Berkala Jalan
55	Ciawi - Bugel	Ciawi	Pemeliharaan Berkala Jalan
56	Parungkadongdong - Singkup	Sukaraja	Pemeliharaan Berkala Jalan
57	Deudeul - Sodonghilir	Taraju	Pemeliharaan Berkala Jalan
58	Mandalasari - Puspahiang	Puspahiang	Pemeliharaan Berkala Jalan
59	Luyubakti - Puspahiang	Puspahiang	Pemeliharaan Berkala Jalan
60	Cilangkap - Cineam	Manonjaya	Pemeliharaan Berkala Jalan
61	Manonjaya - Salopa	Manonjaya	Pemeliharaan Berkala Jalan
62	Gombong - Kertamukti	Ciawi	Pemeliharaan Berkala Jalan
63	Ciawi - Citamba	Ciawi	Pemeliharaan Berkala Jalan
64	Panyusunan - Gombong	Jamanis	Pemeliharaan Berkala Jalan
65	Pagendingan - Cisayong	Cisayong	Pemeliharaan Berkala Jalan

(Sumber: Bidang Jalan dan Jembatan DPUTRLH
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

Kinerja penyelenggaraan jalan pada ruas jalan yang diklasifikasikan sebagai Jalur Jalan Strategis (JJS) dan jalur Layanan Umum (LU) sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.

GAMBAR 3.1.

DOKUMENTASI PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



Pembangunan Jalan – Ruas Ciwatin - Kalapagenep



Pembangunan Jalan – Ruas Sindangreet - Cidadap



Pembangunan Jalan – Ruas Kudang - Cibutei



Pembangunan Jalan – Ruas Papayan - Cikalong



Pembangunan Jalan – Ruas Ciawi - Singaparna

Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output penyelenggaraan jalan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2022 bertambah sepanjang 38,01 km, dimana pada tahun 2021 sepanjang 667,875 km menjadi 705,89 km sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,542.

$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} = \frac{705,89 \text{ Km}}{1303,32 \text{ Km}} = 0,542$$

Sumber: Bidang Jalan dan jembatan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Faktor pendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan jalan pada tahun 2022 diantaranya adalah adanya penambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2022.

2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dihitung dengan formulasi : luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas daerah irigasi kabupaten tasikmalaya x100%.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki 1.486 Daerah Irigasi (DI), dengan luas daerah irigasi Kabupaten Tasikmalaya sebesar 58.011 Ha. Pada tahun 2022 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 38776 Ha sehingga persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 66,84%.

$$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas daerah irigasi kabupaten tasikmalaya}} \times 100\% \\ = \frac{38.776 \text{ Ha}}{58.011 \text{ Ha}} \times 100\% = 66,84\%$$

Sumber: LKIP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, 2021

Sepanjang tahun 2022, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya telah menyelenggarakan pemeliharaan berkala jaringan irigasi di 83 (delapan puluh tiga) Daerah Irigasi.

Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output penyelenggaraan pemeliharaan berkala jaringan irigasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 40323,24 Ha sehingga persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 69,51% dari target 69,51%.

$$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas daerah irigasi kabupaten tasikmalaya}} \times 100\% \\ = \frac{40323,24 \text{ Ha}}{58.011 \text{ Ha}} \times 100\% = 69,51\%$$

Sumber: Bidang PSDA DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, 2022

Faktor pendorong peningkatan kinerja ini diantaranya adalah adanya penambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2022.

GAMBAR 3.2.
DOKUMENTASI PENYELENGGARAAN REHABILITASI
JARINGAN IRIGASI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



Rehabilitasi Jaringan Irigasi – DI Burahol



Rehabilitasi Jaringan Irigasi – DI Cibaeud



Rehabilitasi Jaringan Irigasi – DI Cirama



Rehabilitasi Jaringan Irigasi – DI Sunia



Rehabilitasi Jaringan Irigasi – DI Tanjung

3. Cakupan Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan

Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan, dihitung dengan formulasi : persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik ditambah persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan

Hingga akhir tahun 2021 persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik sebesar 35,35%, diperoleh dari perhitungan jumlah bangunan pemerintah yang telah dibangun dibagi jumlah kebutuhan bangunan pemerintah dikali 80%. Dimana pada tahun tersebut jumlah bangunan yang telah dibangun adalah sebanyak 38 Unit dari jumlah kebutuhan bangunan pemerintah yaitu sebanyak 86 unit.

Sedangkan persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan sebesar 12,32%, diperoleh dari perhitungan jumlah fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan yang telah dibangun dibagi jumlah kebutuhan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan dikali 20% sehingga Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan pada tahun 2021 adalah 47,67%.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak} \\
 & \text{difungsikan sebagai pelayanan publik} + \text{Persentase fasilitas} \\
 & \text{pendukung bangunan gedung pemerintahan} \\
 & = 35,35\% + 12,32\% \\
 & = 47,67\%
 \end{aligned}$$

Sumber: LKIP DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

Sepanjang tahun 2022, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembangunan gedung pemerintahan sebanyak 3 unit dan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan yang telah dibangun sebanyak 5 unit.

Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output penataan bangunan dan lingkungannya pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik sebesar 38,14% dan persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan sebesar 13,26% sehingga Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan adalah 51,40% dari target 51,04%.

$$\begin{aligned}
 & \textit{Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak} \\
 & \textit{difungsikan sebagai pelayanan publik} + \textit{Persentase fasilitas} \\
 & \textit{pendukung bangunan gedung pemerintahan} \\
 & = 38,14\% + 13,26\% \\
 & = 51,40\%
 \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Bangunan dan Jakon DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

Dengan rincian sebagai berikut:

- ✚ Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik, dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\textit{Jumlah bangunan pemerintah yang telah dibangun}}{\textit{Jumlah kebutuhan bangunan pemerintahan}} \times 80\% \\
 & = \frac{41 \text{ Buah}}{86 \text{ Buah}} \times 80\% = 38,14\%
 \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Bangunan dan Jakon DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

- ✚ Persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan, dihitung dengan formulasi:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\textit{Jumlah fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan yang telah dibangun}}{\textit{Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan}} \\
 & = \frac{183 \text{ Buah}}{276 \text{ Buah}} \times 20\% = 13,26\%
 \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Bangunan dan Jakon DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

Analisis penyebab peningkatan kinerja ini diantaranya adalah adanya penambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

GAMBAR 3.3.
DOKUMENTASI PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



Penataan Bangunan dan Lingkungan – Alun-alun Singaparna



Penataan Bangunan dan Lingkungan – Pendopo Baru



Penataan Bangunan dan Lingkungan – Kecamatan Leuwisari



Penataan Bangunan dan Lingkungan – Kecamatan Cikatomas

4. Persentase Ketaatan terhadap RTRW

Persentase Ketaatan terhadap RTRW, dihitung dengan formulasi Rerata dari pejumlahan Realisasi RTRW pada struktur ruang dengan realisasi RTRW pada pola ruang. Dimana realisasi RTRW pada struktur ruang, dihitung dengan formulasi $\frac{\text{Terlegalisasinya Perbup RDTR}}{\text{Target Perbup RDTR}}$ berdasarkan RTRW. Hingga akhir tahun 2022 jumlah perbup RDTR yang terlegalisir sebanyak 1 dokumen dari target perbup RDTR berdasarkan RTRW yaitu 13 dokumen.

Sedangkan untuk realisasi RTRW pada pola ruang, dihitung dengan formulasi $\frac{\text{Luas lahan yang sesuai}}{\text{Luas lahan yang sesuai dengan proses perizinan}}$ ditambah luas lahan yang sesuai dengan proses perizinan dibagi Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sampai dengan tahun 2022, luas wilayah kabupaten Tasikmalaya yaitu 270881 Ha dan luas lahan yang sesuai dengan kabupaten Tasikmalaya yaitu seluas 96921,22 Ha.

Luas lahan yang sesuai dengan proses perizinan adalah seluas 2071,81 Ha, meningkat *fantastis* dari tahun sebelumnya yang hanya seluas 170,17 Ha. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022 terdapat program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait Hak Pengelolaan (HPL), sehingga permohonan PKKPR meningkat.

Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,35%. Pada tahun 2022 Realisasi RTRW pada struktur ruang sebesar 8,33% dan realisasi RTRW pada pola ruang sebesar 36,54% sehingga Ketaatan terhadap RTRW adalah 22,44% dari target 29,50%.

$$\frac{(\text{Realisasi RTRW pada Struktur Ruang} + \text{Realisasi RTRW pada Pola Ruang})}{2}$$

$$= \frac{(8,33\% + 36,54\%)}{2} = 22,44\%$$

Sumber: Bidang Penataan Ruang DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

✚ Realisasi RTRW pada Struktur Ruang, dapat dihitung sbb:

$$\frac{\text{Terlegalisasinya Perbup RDTR}}{\text{Target Perbup RDTR berdasarkan RTRW}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ Dokumen}}{12 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$= 8,33\%$$

Sumber: Bidang Penataan Ruang DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

✚ Realisasi RTRW pada Pola Ruang, dapat dihitung sbb:

$$\frac{\text{Luas lahan yang sesuai} + \text{Luas lahan yang sesuai dengan proses perizinan}}{\text{Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya}} \times 100\%$$

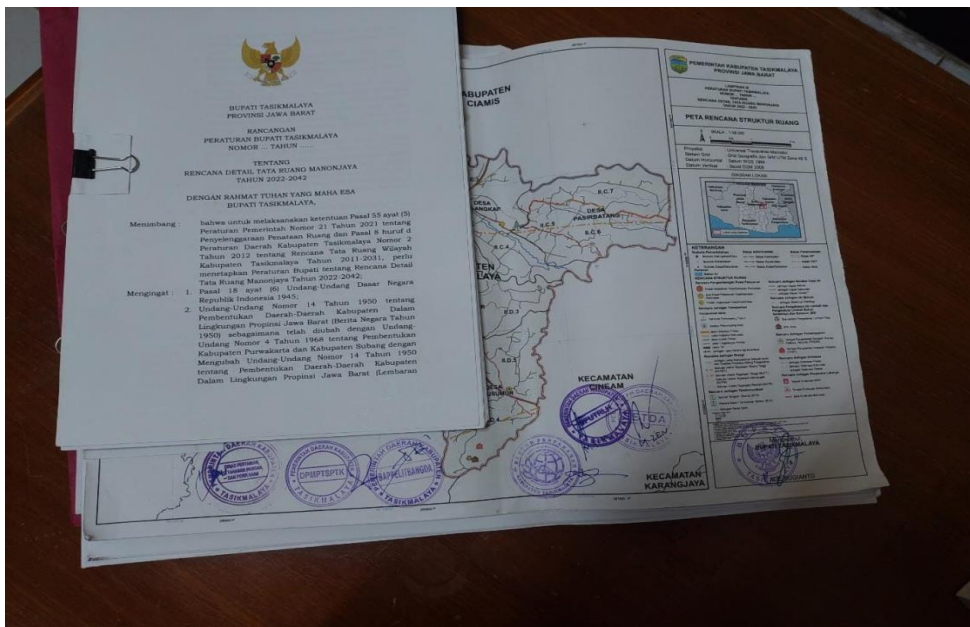
$$= \frac{(96921,22 \text{ Ha} + 2071,81 \text{ Ha})}{270881 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 36,54\%$$

Sumber: Bidang Penataan Ruang DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

Ketaatan terhadap RTRW pada tahun ini pun tidak tercapai, dikarenakan tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan untuk Persub/Perbup RDTR di tingkat Kementerian, sehingga pada Tahun 2022 ini fokus dalam menetapkan Perbup RDTR Manonjaya. Proses persetujuan substansi RDTR Manonjaya dilaksanakan pada 21 Desember 2021 dan surat persetujuan substansi dari Kemen ATR/BPN sebagai dasar penetapan Perkada terbit pada Januari 2023, sehingga RDTR Manonjaya ditetapkan menjadi perkara pada Tahun 2023.

GAMBAR 3.4.
DOKUMENTASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



Penyelenggaraan Penataan Ruang – Perbup RDTR Manonjaya

5. Rasio Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rasio Ketersediaan rumah layak huni, dihitung dengan formulasi jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Dimana jumlah penduduk kabupaten tasikmalaya sebanyak 1803800 jiwa.

Sampai dengan tahun 2021, jumlah rumah layak huni di kabupaten Tasikmalaya sebanyak 456031 unit. Mengalami kenaikan dari awal tahun perencanaan sebanyak 154 unit.

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah penduduk}} = \frac{456.031 \text{ Unit}}{1.803.800 \text{ Jiwa}} = 0,2528$$

Sumber: LKIP DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2021

Sepanjang tahun 2022 rumah layak huni mengalami penambahan sebanyak 1279 unit. Hal ini diakibatkan karena berkurangnya rumah tidak layak huni di kabupaten tasikmalaya.

Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 Rasio Ketersediaan rumah layak huni adalah 0,2535 dari target 0,2533.

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah penduduk}} = \frac{457310 \text{ Unit}}{1.803.800 \text{ Jiwa}} = 0,2535$$

Sumber: Bidang PRKP DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

GAMBAR 3.5.
DOKUMENTASI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni – Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni – Desa Sukamukti Kecamatan Cisayong

Analisis penyebab peningkatan kinerja ini diantaranya adalah adanya penambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun 2022.

6. Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU Pada Kurun Waktu Tertentu

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu, dihitung dengan formulasi jumlah lingkungan yang didukung PSU dibagi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100%.

Jumlah lingkungan perumahan di kabupaten tasikmalaya adalah sebanyak 4652 Perumahan. Dan pada akhir tahun 2021, jumlah lingkungan yang didukung PSU sebanyak 2426 Perumahan.

$$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\% \\ = \frac{2426 \text{ Perumahan}}{4652 \text{ Perumahan}} \times 100\% = 52,14\%$$

Sumber: LKIP DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2021

Sepanjang tahun 2022 jumlah lingkungan yang didukung PSU mengalami penambahan menjadi 2427 Perumahan.

Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pada tahun 2022 mengalami peningkatan, sehingga cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu adalah 52,16 %.

$$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\% \\ = \frac{2427 \text{ Perumahan}}{4652 \text{ Perumahan}} \times 100\% = 52,16\%$$

Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

GAMBAR 3.6.
DOKUMENTASI PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)- Pondok Karisma Residence

Analisis penyebab peningkatan kinerja ini diantaranya adalah adanya kesesuaian perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022.

7. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berakses air, dihitung dengan formulasi jumlah penduduk berakses air minum dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Dimana jumlah penduduk kabupaten tasikmalaya sebanyak 1803800 jiwa.

Sampai dengan tahun 2021, jumlah penduduk berakses air minum di kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1183508 jiwa. Sehingga persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2021 sebesar 65,61%

$$\frac{\text{Jumlah penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\% \\ = \frac{1183508 \text{ Jiwa}}{1803800 \text{ Jiwa}} \times 100\% = 65,61\%$$

Sumber: LKIP DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2021

Sepanjang tahun 2022 jumlah penduduk berakses air minum mengalami penambahan menjadi 6405 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

(SPAM) pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1189913 jiwa sehingga persentase penduduk berakses air minum menjadi 65,97%.

$$\frac{\text{Jumlah penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\% \\ = \frac{1189913 \text{ Jiwa}}{1803800 \text{ Jiwa}} \times 100\% = 65,97\%$$

Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

Analisis penyebab peningkatan kinerja ini diantaranya adalah adanya peningkatan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait pendanaan untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dasar (SPM).

GAMBAR 3.7.
DOKUMENTASI PEMBANGUNAN BARU SPAM JARINGAN
PERPIPAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa - Batusumur Kecamatan Manonjaya



Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan - Desa Madiasari Kecamatan Cineam

8. Persentase rumah tinggal berakses sanitasi

Persentase rumah tinggal berakses sanitasi, dihitung dengan formulasi jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibagi jumlah rumah tinggal dikali 100%. Dimana jumlah rumah tinggal kabupaten tasikmalaya sebanyak 505122 unit rumah.

Sampai dengan tahun 2021, jumlah rumah tinggal berakses sanitasi di kabupaten Tasikmalaya sebanyak 247067 unit rumah. Sehingga persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2021 sebesar 48,91%.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\% \\ & = \frac{247067 \text{ Rumah}}{505122 \text{ Rumah}} \times 100\% = 48,91\% \end{aligned}$$

Sumber: LKIP DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2021

Sepanjang tahun 2022 jumlah rumah tinggal berakses sanitasi mengalami penambahan menjadi 1274 SR. Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 248341 rumah, sehingga persentase penduduk berakses air minum menjadi 49,16%.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\% \\ & = \frac{248341 \text{ Rumah}}{505122 \text{ Rumah}} \times 100\% = 49,16\% \end{aligned}$$

Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

Analisis penyebab peningkatan kinerja ini diantaranya adalah adanya peningkatan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait pendanaan untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dasar (SPM).

GAMBAR 3.8.
DOKUMENTASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022



Pembangunan MCK Komunal - Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dihitung dengan formulasi $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan perhitungan yang sudah disediakan oleh provinsi. Untuk tahun 2022 ini, nilai indeks kualitas air (IKA) sebesar 88,62, indeks kualitas udara (IKU) sebesar 65,0 dan indeks kualitas lahan (IKL) sebesar 36,97. Sehingga nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun ini sebesar 68,43.

Nilai IKLH

$$\begin{aligned}
 &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\
 &= (0,376 (65,0)) + (0,405 (88,62)) + (0,219 (36,97)) \\
 &= 68,43
 \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Lingkungan Hidup DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,81, hal ini disebabkan karena dukungan anggaran yang memadai dari program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

GAMBAR 3.9.
DOKUMENTASI KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI,
DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA
TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022



Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut

10. Prosentase Sampah Yang Terkelola

Prosentase sampah yang terkelola, dihitung dengan formulasi jumlah sampah yang tertangani (ton) dibagi total jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota (ton) x100%. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah sampah yang tertangani oleh bidang lingkungan hidup sebanyak 28.504,72 ton dari total jumlah timbunan sampah di kabupaten Tasikmalaya sebanyak 356.309 ton.

Sedangkan pada tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 14986,28 ton menjadi 43491 ton. Total jumlah timbunan sampah di kabupaten Tasikmalaya pun mengalami kenaikan seiring dengan penambahan jumlah penduduk kabupaten yaitu sebesar 480421 ton.

$$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{43491 \text{ ton}}{480421 \text{ ton}} \times 100\% = 9,05\%$$

Sumber: Bidang Lingkungan Hidup DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2022

GAMBAR 3.10.
DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022



Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Tasikmalaya

11. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) sebesar 45 poin, yang diperoleh dari rata-rata hasil Perhitungan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022. Pada tahun 2022 ini merupakan tahun pertama penilaian reformasi birokrasi secara mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.8. berikut ini.

TABEL 3.8.
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu serta berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	106,05	93,40	12,65
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100	92,85	7,15
	Cakupan Ketersediaan Bangunan Pemerint- han dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	100,71	98,14	2,57
	Ketaatan terhadap RTRW	76,06	99,98	(23,92)
Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak	Persentase penduduk berakses air minum	100,08	97,64	2,44
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	99,64	99,49	0,15
	Rasio Rumah Layak Huni	100,09	99,96	0,13
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	99,92	94,02	5,9
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	105,63	71,66	33,97
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	109,86	93	16,86
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	84,91	92,28	(7,37)

B. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut disajikan Program/Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja indikator Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya:

TABEL 3.9.
PROGRAM/KEGIATAN YANG Mendukung INDIKATOR DPUTRLH

Indikator Kinerja dalam PK	Program/Kegiatan Terkait	Kinerja Tahun 2022				
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	51,24	54,16	105,70
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik	Km	667,87	705,89	105,69
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan areal daerah irigasi (<1000 Ha) yang terlayani	Ha	40.323,24	40.323,24	100
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas baku daerah irigasi yang terlayani	Ha	40.273,24	40.273,24	100
Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan bangunan pemerintahan yang layak difungsikan	%	47,67	47,67	100
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintahan yang telah dibangun	Unit	41	41	100
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ketersediaan fasilitas pendukung bangunan pemerintahan	%	64,49	66,30	102,81
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas bangunan dan lingkungannya yang telah dibangun	Unit	178	183	102,81
Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	%	23,08	7,69	33,32
		Realisasi RTRW pada Pola Ruang	%	35,93	36,59	101,84
	Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun	Dok	1	1	100
Persentase penduduk berakses air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum dengan jaringan perpipaan	%	19,57	19,57	100
		Persentase penduduk berakses air minum bukan jaringan perpipaan	%	46,35	0	0
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman	Jiwa	1.189.098	1.189.913	100,25
Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan skala setempat	%	45,54	45,54	100
		Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan skala terpusat	%	3,91	3,91	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tinggal yang telah berakses sanitasi	Rumah	249.252	248.355	99,64

Indikator Kinerja dalam PK	Program/Kegiatan Terkait	Kinerja Tahun 2022				
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Rasio Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	0	0
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani	Unit	21	0	0
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	%	9,75	9,75	100
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	Unit	49.308	49.432	100,25
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	%	80,54	80,42	99,85
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni di luar kawasan kumuh	Unit	407.529	406.911	99,85
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	%	0,26	0,26	100
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU	Unit	242.841	242.841	100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas	Poin	72,42	73,12	100,97
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,66	82,66	100
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan	%	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan	%	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum sesuai kebutuhan	%	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	%	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	%	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelarasn dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	%	100	100	100

Indikator Kinerja dalam PK	Program/Kegiatan Terkait	Kinerja Tahun 2022				
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	Dok	2	2	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	%	100	100	100
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kualitas lingkungan hidup daerah	Lap	1	1	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas lahan RTH	%	0,75	0,75	100
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas lahan RTH yang dikembangkan	Ha	31,68	35,68	112,63
Persentase jumlah sampah yang tertangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	Kubik	111.820	130538,84	109,86
	Pengelolaan Sampah	Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah	%	0,36	0,36	100

C. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 menyelenggarakan 15 (Lima Belas) Program, 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 234.818.438.426,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 221.435.389.494,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau 94,30%.

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan sampai dengan Bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut.

TABEL 3.10
PAGU DAN REALISASI KEUANGAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022			Capaian (%)	Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu serta berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Poin	0,511	0,542	106,05	Program Penyelenggaraan Jalan	131.095.943.016	122.441.188.700	93,40
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,51	69,51	100	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	22.833.244.875	21.200.183.080	92,85
		Cakupan Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	Persen	51,04	51,40	100,71	Program Penataan Bangunan Gedung	222.310.000	221.979.150	99,85
							Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	27.013.670.000	26.046.718.751	96,42
		Ketaatan terhadap RTRW	Persen	29,50	22,44	76,06	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	485.350.000	485.275.000	99,98
2.	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	65,92	65,97	100,08	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.708.552.000	10.455.702.000	97,64
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	49,34	49,16	99,64	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.624.246.000	10.570.413.500	99,49
		Rasio Rumah Layak Huni	Poin	0,2533	0,2535	100,09	Program Pengembangan Perumahan	0	0	0
							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	800.860.000	800.340.000	99,94
							Program Kawasan Permukiman	5.777.730.000	5.776.343.100	99,98
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,20	52,16	99,92	Program PSU	224.580.000	211.159.800	94,02
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	64,78	68,43	105,63	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150.000.000	79.752.600	53,17
							Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75.000.000	71.849.000	95,80
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.006.070.000	990.599.400	66
4.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	8,24%	9,05	109,86	Program Pengelolaan Persampahan	1.725.915.000	1.713.597.200	93
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	53	45	84,91	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.074.967.535	20.370.288.213	92,28
Jumlah								234.818.438.426	221.435.389.494	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Pada tahun ini, Laporan Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk tahun kedua Renstra, melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi di tahun sebelumnya.

Capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya diukur dan diperoleh dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung 5 (lima) Sasaran Strategis sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terdapat 2(dua) Indikator Kinerja Sasaran yang secara signifikan berada di bawah target kinerja yang diperjanjikan, yaitu Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Ketaatan Terhadap RTRW.

Rata-rata capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebesar 98,45% dengan kategori BAIK. Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh insan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan arahan Renstra dan direktif Kepala Daerah.

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Perangkat Daerah, maka diharapkan penyusunan LKIP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini dapat memenuhi fungsinya sebagai :

1. sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;

3. cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan;
4. alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan organisasi dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan;
5. cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan; dan
6. bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah